PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Michael Januarta Turnip
NPP. 33.0395
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email : michaeljanuarta88@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Eko Budi Santoso, MT.
Email: budi_santoso@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Waste management in Bandung Regency is hindered by an over-reliance on government-centric technical approaches, while community participation—a key factor for sustainable waste management—remains insufficiently mapped and developed.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the level and forms of community participation in waste management in Bandung Regency.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through in-depth interviews, field observation, and document study, then analyzed interactively using Sherry R. Arnstein's Ladder of Citizen Participation as the analytical framework.* ***Result:*** *The findings show that community participation collectively remains at the Tokenism level, particularly at Informing and Consultation. Embryos of Citizen Power are emerging in Kopo and Pangauban Villages through community-managed TPS 3R and Community Self-Help Groups (KSM). Government efforts have shifted toward delegation of authority and partnership, yet are hampered by limited fleet capacity (only 118 vehicles for 280 villages), dependence on village head commitment, and inconsistent waste transport services.* ***Conclusion:*** *Community participation in waste management in Bandung Regency remains at the Tokenism level with emerging embryos of Citizen Power, requiring fleet optimization, technical assistance, strengthened village regulations, waste bank activation, retribution transparency, and expansion of organic waste processing.*

Keywords: *Arnstein's Ladder of Participation; Bandung Regency; Community Participation; Waste Management*

ABSTRAK

Permasalahan: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung terhambat oleh pendekatan teknis yang masih bertumpu pada pemerintah, sementara partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan belum terpetakan dan dikembangkan secara optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara interaktif menggunakan Teori Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry R. Arnstein. **Hasil/Temuan:** Partisipasi masyarakat secara kolektif masih berada pada level Tokenisme, khususnya pada anak tangga Pemberian Informasi dan Konsultasi. Embrio Kekuatan Warga mulai terlihat di Desa Kopo dan Desa Pangauban melalui pengelolaan mandiri TPS 3R dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Upaya pemerintah telah bergeser ke arah pendelegasian wewenang dan kemitraan, namun terkendala keterbatasan armada (118 unit untuk 280 desa), ketergantungan pada figur kepala desa, dan inkonsistensi layanan pengangkutan. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung masih berada pada level Tokenisme dengan embrio Kekuatan Warga yang mulai tumbuh, sehingga diperlukan optimalisasi armada, pendampingan teknis, penguatan regulasi desa, aktivasi bank sampah, transparansi retribusi, serta perluasan pengolahan sampah organik untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kabupaten Bandung; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Sampah; Tangga Partisipasi Arnstein

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan isu global yang terus berkembang seiring pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi. Berdasarkan data World Bank (2018), proyeksi timbulan sampah global pada tahun 2050 diperkirakan mencapai 3,40 miliar ton per tahun. Di tingkat nasional, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 mencatat timbulan sampah nasional mencapai 35,31 juta ton per tahun, dengan komposisi didominasi sampah sisa makanan (39,26%) dan sampah plastik (19,69%).

Di tingkat lokal, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung tahun 2024, timbulan sampah mencapai 1.312 ton per hari dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari 3.623.790 jiwa pada tahun 2020 menjadi 3.839.721 jiwa pada tahun 2024. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah menggulirkan berbagai program strategis seperti Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah (PUSPA), pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF), Bank Sampah, dan TPS3R, permasalahan sampah belum terselesaikan secara optimal. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) DLH tahun 2024 mencatat bahwa capaian kinerja penanganan sampah hanya terealisasi sebesar 36,88% dari target 59,31%.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pendekatan *top-down* semata tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci yang diyakini mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia, Santoso & Moenek (2018) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, di mana masyarakat belum dilibatkan secara substansial dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini sejalan dengan permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Bandung, di mana berbagai program pengelolaan sampah berbasis komunitas belum mampu mendorong partisipasi aktif warga secara merata. Meskipun demikian, tingkat dan kualitas keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung belum terpetakan secara mendalam.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia seperti Payakumbuh (Syafer & Putera, 2024), Pekanbaru (Saputra et al., 2022), dan Sukabumi (Puspita et al., 2023). Di tingkat internasional, Salsabila et al. (2021) menyimpulkan bahwa keterlibatan publik merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, namun mekanisme pelibatan yang efektif masih sangat bergantung pada konteks kebijakan dan kapasitas kelembagaan lokal. Meskipun studi-studi tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji secara mendalam tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung menggunakan Teori Tangga Partisipasi Arnstein secara komprehensif—mulai dari dimensi Non-Partisipasi, Tokenisme, hingga Kekuatan Warga—sekaligus menganalisis upaya pemerintah daerah beserta hambatan yang dihadapi dalam satu kerangka penelitian yang terintegrasi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung sebagai dasar perumusan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Brotosusilo et al. (2020) membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat dan intensitas keterlibatan sosial di tingkat komunitas merupakan faktor terkuat yang meningkatkan partisipasi individu dalam pengelolaan sampah—temuan ini menegaskan urgensi penelitian yang memetakan secara mendalam kondisi partisipasi di Kabupaten Bandung agar program pemerintah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran. Tanpa pemetaan yang mendalam mengenai posisi partisipasi masyarakat dalam tangga Arnstein, program-program pemerintah berisiko tidak mencapai sasaran dan hanya bersifat formalitas administratif tanpa dampak nyata.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu yang relevan. Syafer & Putera (2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di Kota Payakumbuh masih rendah dan memerlukan sosialisasi yang lebih intensif. Saputra et al. (2022) mengungkap rendahnya partisipasi masyarakat di Bank Sampah Pekanbaru akibat

sosialisasi yang belum merata dan kurangnya kesadaran masyarakat. Puspita et al. (2023) menemukan pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. Indrawati et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi berbasis pemberdayaan komunitas di Desa Cibodas Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan warga. Subri et al. (2025) membuktikan bahwa kesadaran lingkungan, persepsi manfaat, dan pengaruh sosial menjadi pendorong kuat partisipasi masyarakat.

Dari perspektif internasional, Salsabila et al. (2021) menemukan bahwa partisipasi publik merupakan prasyarat keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan, sementara Brotosusilo et al. (2020) membuktikan bahwa pemberdayaan dan keterlibatan sosial di tingkat komunitas merupakan faktor paling kuat mendorong partisipasi individu. Fatmawati et al. (2022) mengungkap bahwa implementasi kebijakan bank sampah di Indonesia belum optimal akibat lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Latanna et al. (2023) menemukan bahwa konteks tata kelola program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia bersifat predominan restriktif, terutama akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi. Secara kolektif, studi-studi ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi isu sentral yang membutuhkan intervensi kebijakan komprehensif dan berbasis pemberdayaan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam tiga aspek. Pertama, dari segi objek penelitian, penelitian ini secara khusus mengkaji Kabupaten Bandung—salah satu kabupaten dengan volume timbulan sampah tertinggi di Jawa Barat—yang belum dikaji secara mendalam menggunakan kerangka Arnstein. Kedua, dari segi kedalaman analisis, penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga secara bersamaan menganalisis upaya pemerintah daerah dan hambatan yang dihadapi dalam satu kerangka Teori Tangga Partisipasi Arnstein (1969) yang dilengkapi dengan perspektif kritis Tritter dan McCallum (2006). Ketiga, dari segi metode, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang komprehensif mencakup wawancara mendalam dengan Kepala DLH, kepala bidang, sekretaris desa, pengelola sampah, hingga tokoh masyarakat, yang menghasilkan gambaran holistik tentang dinamika partisipasi di lapangan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan Teori Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus (Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena partisipasi masyarakat secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata—khususnya dalam menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa"—yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data statistik. Studi kasus dipilih karena batasan antara fenomena "partisipasi masyarakat" dan

"konteks" program pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018; Creswell, 2014).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mulai Januari hingga Juni 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi secara triangulasi: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur, (2) observasi langsung di lapangan, dan (3) studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kapasitas, peran, dan relevansinya, yang terdiri dari Kepala DLH Kabupaten Bandung (I1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH (I2), Sekretaris Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin (I3), Pengelola Sampah Kecamatan Katapang (I4), dan delapan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah (I5).

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup tiga tahapan: (1) reduksi data; (2) penyajian data dalam matriks kategori dan narasi deskriptif; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah Teori Tangga Partisipasi Arnstein (1969) dengan tiga tingkatan: Non-Partisipasi (Manipulasi dan Terapi), Tokenisme (Pemberian Informasi, Konsultasi, dan Penenangan), serta Kekuatan Warga (Kemitraan, Pendelegasian Wewenang, dan Kontrol Penuh Warga). Dalam konteks pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia, Lambelanova et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada konsistensi pendampingan teknis dan komitmen pemerintah setempat — pertimbangan metodologis ini mendasari pemilihan informan dari level pemerintah daerah hingga komunitas lokal secara bersamaan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung dilakukan menggunakan Teori Tangga Partisipasi Arnstein (1969) yang mencakup tiga tingkatan utama. Pembahasan berikut mengintegrasikan temuan mengenai kondisi partisipasi masyarakat, upaya pemerintah daerah, dan hambatan yang dihadapi secara bersamaan pada setiap dimensi.

3.1. Tingkat Non-Partisipasi

Pada dimensi Non-Partisipasi, pendekatan pemerintah daerah melalui DLH masih didominasi oleh upaya edukatif dan persuasif yang bersifat satu arah. Berdasarkan Laporan AKIP DLH Tahun 2024, pemerintah secara rutin melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis (Bimtek), dan kampanye lingkungan seperti program "Sekolah Sampah" kepada kader-kader lingkungan di tingkat desa.

Pada anak tangga Manipulasi, partisipasi digunakan bukan untuk memberdayakan masyarakat, melainkan untuk memperoleh legitimasi formal atas program yang telah lebih dahulu dirancang. Pembentukan kelompok warga seperti Kader B3S secara struktural dibentuk dalam kerangka program DLH, namun penentuan lokasi TPS, jadwal pengangkutan, dan alokasi anggaran tetap diputuskan secara sepihak oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan kritik Tritter dan McCallum (2006) bahwa pendelegasian wewenang kepada organisasi lokal justru

dapat menjadi cara pemerintah melepas tanggung jawab keterlibatan aktif tanpa benar-benar membagi kekuasaan pengambilan keputusan. Pola ini juga sejalan dengan temuan Latanna et al. (2023) yang menemukan bahwa tata kelola program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia bersifat predominan restriktif, di mana partisipasi masyarakat seringkali diposisikan sebagai pelengkap program pemerintah daripada sebagai aktor pengambil keputusan.

Pada anak tangga Terapi, akar permasalahan sampah ditempatkan sepenuhnya pada perilaku masyarakat yang dianggap belum sadar lingkungan. Informan Bu Tia (Baleendah) mengungkapkan bahwa informasi pemilahan hanya diterimanya melalui grup WhatsApp RT tanpa pendampingan teknis langsung. Observasi lapangan menemukan tumpukan sampah yang masih menggunung di beberapa titik yang tidak jauh dari lokasi penyuluhan. Hambatan utama pada dimensi ini adalah rendahnya pengetahuan dasar masyarakat akibat sosialisasi yang tidak disertai pendampingan teknis langsung. Brotosusilo et al. (2020) membuktikan bahwa pemberdayaan dan keterlibatan sosial di tingkat komunitas merupakan faktor paling kuat mendorong partisipasi individu dalam pengelolaan sampah—temuan ini menegaskan bahwa selama pemerintah masih bertumpu pada sosialisasi satu arah tanpa memperkuat modal sosial dan kapasitas komunitas, partisipasi tidak akan meningkat ke level yang lebih tinggi.

3.2. Tingkat Tokenisme

Pada dimensi Tokenisme, partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung secara umum masih berada pada anak tangga Pemberian Informasi dan Konsultasi. Pemerintah telah memanfaatkan berbagai kanal komunikasi seperti grup WhatsApp RT/RW, papan pengumuman kantor desa, dan situs web resmi DLH untuk menyebarkan informasi terkait jadwal pengangkutan dan aturan pemilahan sampah. Namun informasi ini masih bersifat satu arah—warga diberitahu tanpa tersedianya saluran untuk memberikan umpan balik atau mempertanyakan kebijakan yang ada.

Pada anak tangga Konsultasi, Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 dan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan DLH menunjukkan adanya upaya untuk menampung aspirasi warga. Namun wawancara mendalam mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara "didengar" dan "diakomodasi". Banyak warga yang mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan pengangkutan sampah, namun keluhan tersebut seringkali hanya berujung pada permintaan maaf tanpa tindak lanjut konkret. Fatmawati et al. (2022) mengungkap pola serupa dalam studi komparatif mereka di Makassar dan Bantaeng, di mana implementasi kebijakan bank sampah belum optimal terutama karena sosialisasi di masyarakat masih dianggap kurang optimal dan komunikasi antar pemangku kepentingan masih lemah—pola ini mempertegas bahwa tantangan konsultasi yang tidak diakomodasi bukanlah masalah lokal Kabupaten Bandung semata, melainkan persoalan sistemik pengelolaan sampah di Indonesia.

Hambatan terbesar pada dimensi Tokenisme adalah keterbatasan armada—hanya 118 unit untuk melayani 280 desa. Kondisi ini diakui secara eksplisit oleh informan Pak Ahmad (I7) yang menyatakan tidak memilah sampah karena "percuma, nanti dicampur lagi oleh petugas". Inkonsistensi jadwal pengangkutan—yang menurut Bu Tia (I5) dapat terlambat hingga dua hingga tiga minggu—mendorong warga kembali ke pola Non-Partisipasi seperti

membakar sampah atau membuang ke badan sungai. Pola hambatan ini terbukti mendorong perilaku pembuangan sampah informal, sebagaimana juga ditemukan Latanna et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kurangnya perusahaan daur ulang di konteks perkotaan Indonesia menjadi hambatan struktural yang mengurangi keberlanjutan program berbasis komunitas.

3.3. Tingkat Kekuatan Warga

Pada anak tangga Kemitraan, kolaborasi antara DLH dengan komunitas pengelola sampah dan KSM di tingkat desa mulai terbentuk. Berdasarkan Laporan AKIP DLH 2024, optimalisasi 172 unit TPS 3R merupakan wujud nyata pembagian tanggung jawab antara DLH dan masyarakat pengelola, di mana DLH menyediakan sarana prasarana seperti mesin pencacah dan armada cator sementara operasional dikendalikan sepenuhnya oleh komunitas lokal. Namun kemitraan ini belum merata di seluruh wilayah karena masih sangat bergantung pada tingkat kepedulian dan komitmen kepala desa setempat. Sejalan dengan Mulyana et al. (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal membutuhkan kehadiran figur penggerak lokal dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, penelitian ini menemukan bahwa tanpa komitmen kepala desa, banyak program TPS 3R yang terbengkalai tanpa dukungan operasional yang memadai.

Bukti paling konkret dari anak tangga Pendelegasian Wewenang ditemukan di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin. Sesuai amanat Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah daerah mendelegasikan wewenang pengelolaan sampah kepada pemerintah desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Di Desa Kopo, warga tidak hanya dilibatkan dalam operasional, tetapi juga dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan fasilitas, penentuan jadwal pengangkutan, hingga perencanaan pendirian Bank Sampah di setiap RW. Keberhasilan ini diakui dengan penghargaan dari Bupati Bandung sebagai desa percontohan tuntas sampah (wawancara Pak Yunus, I3). Namun sebagaimana diingatkan Tritter dan McCallum (2006), pendelegasian wewenang berisiko menjadi cara pemerintah melepas tanggung jawab aktif, terbukti dari masih banyaknya program TPS 3R di desa-desa lain yang terbengkalai setelah wewenang diserahkan tanpa disertai pendampingan berkelanjutan.

Pada anak tangga Kontrol Penuh Warga, embrio kemandirian mulai terlihat melalui inisiatif-inisiatif mandiri warga. Di Desa Pangauban, di bawah pengelolaan Pak Engkus (I4), warga diberikan otoritas melalui sistem *cashback* bagi yang disiplin memilah sampah. Pada level individu, Bu Tia (Baleendah) memanfaatkan sampah organik sebagai pakan ikan lele, sementara Bu Nurhaini (Banjaran) dan Pak Yayan (Ciwidey) mengolahnya menjadi pupuk. Namun kontrol penuh warga dalam pengertian Arnstein yang sesungguhnya belum tercapai secara menyeluruh, karena keberhasilan ini masih bersifat sporadis dan bergantung pada keberadaan figur penggerak di tingkat lokal. Hambatan utama pada dimensi Kekuatan Warga adalah ketergantungan keberhasilan program pada figur kepala desa dan keterbatasan anggaran, di mana target retribusi sebesar Rp5,041 miliar masih jauh dari ideal untuk mendukung operasional pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Santoso & Moenek (2018) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam konteks pemerintahan daerah membutuhkan investasi kapasitas kelembagaan yang konsisten dan mekanisme

desentralisasi fiskal yang memadai—prasyarat yang belum sepenuhnya terpenuhi di Kabupaten Bandung.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung secara umum masih berada pada level Tokenisme dengan embrio Kekuatan Warga yang bersifat sporadis. Temuan ini sejalan dengan Syafer & Putera (2024) serta Saputra et al. (2022) yang menemukan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa tantangan ini bersifat sistemik.

Berbeda dengan temuan Puspita et al. (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan kebijakan saja—meskipun telah lengkap secara regulasi—tidak secara otomatis mendorong peningkatan partisipasi jika tidak didukung oleh sarana yang memadai dan mekanisme umpan balik yang nyata. Hal ini juga selaras dengan Fatmawati et al. (2022) yang menemukan dalam studi komparatif mereka bahwa komunikasi yang kurang optimal antara pemerintah dan masyarakat menjadi hambatan utama implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia. Sementara itu, Latanna et al. (2023) secara lebih luas menegaskan bahwa tata kelola program berbasis komunitas di Indonesia pada umumnya bersifat restriktif terutama karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antar aktor—temuan yang memperkuat analisis hambatan dalam penelitian ini.

Temuan menarik penelitian ini adalah bahwa keberhasilan pendekatan berbasis komunitas—seperti yang ditemukan Indrawati et al. (2021) di Desa Cibodas Kabupaten Bandung dan Subri et al. (2025) di Malaysia—dapat direplikasi di Kabupaten Bandung, sebagaimana terbukti di Desa Kopo dan Desa Pangauban. Namun keberhasilan ini membutuhkan prasyarat berupa komitmen pemimpin lokal dan dukungan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Brotosusilo et al. (2020) secara kuantitatif membuktikan bahwa pemberdayaan dan partisipasi sosial di tingkat komunitas merupakan faktor yang paling signifikan mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah—temuan ini memperkuat saran penelitian ini bahwa intervensi berbasis penguatan kapasitas komunitas lebih efektif dari sekadar pendelegasian wewenang formal.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan fenomena berupa "siklus hambatan" yang secara struktural menarik partisipasi masyarakat ke level yang lebih rendah. Keterbatasan armada pengangkut (118 unit untuk 280 desa) berdampak langsung pada inkonsistensi jadwal pengangkutan, yang kemudian melemahkan motivasi warga untuk memilah sampah karena sampah terpilah akhirnya dicampur kembali oleh petugas. Kondisi ini mendorong warga kembali ke pola Non-Partisipasi seperti membuang sampah ke sungai atau membakar sampah. Temuan ini berkorespondensi dengan Salsabila et al. (2021) yang menegaskan bahwa ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah formal dalam merespons kebutuhan masyarakat secara konsisten menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi publik dalam jangka panjang—karena masyarakat cenderung menilai keterlibatan mereka tidak memiliki dampak nyata.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung secara umum masih berada pada level Tokenisme, khususnya pada anak tangga Pemberian Informasi dan Konsultasi, di mana warga menerima informasi dan dapat menyampaikan keluhan tetapi tidak memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi keputusan akhir. Upaya pemerintah daerah telah menunjukkan pergeseran dari pendekatan *top-down* menuju *bottom-up* melalui bimbingan teknis, konsultasi publik, pendelegasian wewenang kepada desa, dan fasilitasi KSM serta TPS 3R. Namun efektivitas upaya tersebut terhambat oleh keterbatasan armada (118 unit untuk 280 desa), inkonsistensi jadwal pengangkutan, ketergantungan pada figur kepala desa, serta keterbatasan anggaran yang membuat program tidak berkelanjutan. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya penambahan armada dan optimalisasi cator, aktivasi kembali Bank Sampah di setiap RW sebagai insentif ekonomi, peningkatan edukasi dari sosialisasi satu arah ke bimbingan *door-to-door* yang demonstratif, penyusunan Perdes wajib pilah sampah, perbaikan sistem retribusi berbasis transparansi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa agar program tidak terhenti ketika terjadi pergantian kepala desa.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa cakupan wilayah yang tidak merata—peneliti lebih banyak mengakses data dari wilayah Baleendah, Kutawaringin, Katapang, Banjaran, dan Ciwidey—sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Selain itu, dinamika pengelolaan sampah yang terus berubah menjadikan beberapa data berbasis kebijakan dan anggaran dapat berubah setelah penelitian selesai dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work).

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan survei kuantitatif yang lebih luas untuk mengukur distribusi tingkat partisipasi di seluruh kecamatan Kabupaten Bandung. Kajian komparatif antara desa-desa yang berhasil (seperti Desa Kopo) dengan desa-desa yang program TPS 3R-nya terbengkalai juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor keberhasilan replikasi model partisipasi berbasis komunitas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Ir. Eko Budi Santoso, MT. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih pula kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta jajarannya, Pemerintah Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin, Pengelola Sampah Kecamatan Katapang, serta seluruh tokoh masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi dan meluangkan waktu untuk diwawancarai. Penelitian ini juga tidak terlepas dari dukungan keluarga dan rekan-rekan Praja Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, *85*(1), 24–34. https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388

Brotosusilo, A., Nabila, S. H., Negoro, H. A., & Utari, D. (2020). The level of individual participation of community in implementing effective solid waste management policies. *Global Journal of Environmental Science and Management, 6*(3), 341–354. https://doi.org/10.22034/gjesm.2020.03.05

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *Pengelolaan sampah*. Institut Teknologi Bandung.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024*. DLH Kabupaten Bandung.

Fatmawati, F., Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah, A. (2022). Waste bank policy implementation through collaborative approach: Comparative study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability, 14*(13), 7974. https://doi.org/10.3390/su14137974

Indrawati, D., Ruhiyat, R., Indrawati, E., & Siami, L. (2021). Efforts to increase community participation in 3R-based waste management in Cibodas Village, Pasirjambu District, Bandung Regency. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(1), 51–56.

Lambelanova, R., Anggraini, W., & Ritonga, N. A. (2022). Pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 7*(2), 72–92. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2

Latanna, M. D., Gunawan, B., Franco-García, M. L., & Bressers, H. (2023). Governance assessment of community-based waste reduction program in Makassar. *Sustainability, 15*(19), 14371. https://doi.org/10.3390/su151914371

Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mulyana, M., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakaru di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 7*(2), 16–32. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2797

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.

Nasution, Z. (2009). *Solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat desa transisi: Suatu tinjauan sosiologis*. UMM Press.

Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 14*(1), 1–11. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807

Salsabila, L., Purnomo, E. P., & Jovita, H. D. (2021). The importance of public participation in sustainable solid waste management. *Journal of Governance and Public Policy, 8*(2), 106–123. https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11519

Santoso, E. B., & Moenek, R. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 8*(2). https://doi.org/10.33701/jiwbp.v8i2.292

Saputra, T., Nurpeni, N., Astuti, W., Harsini, H., Nasution, S. R., Eka, E., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah. *Jurnal Kebijakan Publik, 13*(3), 246. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8073

Subri, U. S., Ghani, N. M., Mastam, N. M., Zakaria, A. F., Mustafa, M. S. S., & Damanhuri, A. A. M. (2025). Sustainable solutions for household waste management: Transforming UCO into soap in local communities. *Multidisciplinary Reviews, 8*(9). https://doi.org/10.31893/multirev.2025196

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Syafer, E., & Putera, R. E. (2024). Analisa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(5), 4568–4583. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14893

Tritter, J. Q., & McCallum, A. (2006). The snakes and ladders of user involvement: Moving beyond Arnstein. *Health Policy, 76*(2), 156–168. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2005.05.008

World Bank. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank Group. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.